LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi *Kalimantan Tengah merupakan laporan sebagai sarana pertanggungjawaban* selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2019. Laporan ini merupakan suatu kerangka transparansi dan akuntabel yang perlu di pertanggung jawabkan dan juga merupakan mekanisme tugas-tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi pelaksanaan tugas tugas umum, pembangunan, kemasyarakatan, pelayanan pada tahun 2019. Laporan ini disusun sebagai perwujudan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi keluarga berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) di semua Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat. Agar setiap Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PUHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas awal yang paling mendasar dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah mengubah mindset individu dan budaya lembaga dari buta dan bias gender menjadi sadar, sensitif, peduli, dan tanggap (responsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli anak.

Oleh karena itu, indikator *outcome*, terlebih lagi indikator dampak *(impact)* dari capaian layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan usaha dan komitmen dari seluruh *stakeholder*, mengingat jangka waktu yang relatif pendek

(satu tahun). Selain itu, melihat visi dan misinya, maka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam *mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak* ke dalam kebijakan, program, dan kegiatannya.

Palangka Raya, Februari 2020

Kepala Dinas P3A-PPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS P3A-PPKB

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

BAB III

CAPAIAN KINERJA URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkruen

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
d) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
e) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

f) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
g) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
h) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
i) pengelolaan kesekretariatan Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
j) pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

2. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perangkat Daerah merupakan perbandingan capaian kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, maupun terhadap IKK yang tertuang dalam Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya diterangkan jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk menganalisa kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pencapaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perangkat Daerah DP3A-PPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

NO	Indikator	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian
			2017	2018	2019	2020	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	12,30	10,41	10,88	11,36	11,83	6,34
11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	29,62	21,58	23,59	25,60	27,61	80,85
11.3	Rasio KDRT	0,012	0,0244	0,0213	0,0182	0,0151	11,25
11.4	Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)	0,00	0,30	0,23	0,15	0,08	0,00
11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	57,18	53,06	54,09	55,12	56,15	56,60
11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100	100,00
11.7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80,22	78,25	78,57	79,31	79,67	77,03
11.8	Indek Pembangunan Gender (IPG)	90,00	89,36	89,54	89,67	89,88	89,13

3. Kepegawaian

a. Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering.

Jumlah Struktur Jabatan yang ada pada bagian urusan pemberdayaan perempuan dan sekretariat sesuai dengan prosedur dan persyaratan pelantikan jabatan yang didudukinya. Adapun rincian SDM Pegawai pada bagian urusan pemberdayaan perempuan, UPT PPA dan sekretariat yaitu sebagai berikut :

(1) Jumlah PNS sebanyak 48 orang aktif bekerja.

(2) Berdasarkan pangkat dan golongan

- Golongan IV = 9 orang
- Golongan III = 33 orang
- Golongan II = 6 orang
- Golongan I = 0 orang
- CPNS = - orang

(3) Pegawai Kontrak = 15 orang

(4) Berdasarkan eselon

- Eselon II = 1 orang
- Eselon III = 6 orang
- Eselon IV = 18 orang

(5) Jumlah Pejabat Struktural 25 orang

(6) Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan pada bagian urusan pemberdayaan perempuan dan sekretariat tahun 2019 sebanyak 21 orang terhadap jumlah total pejabat yang ada yaitu sebanyak 25 orang.

(7) Jumlah pejabat pada bagian urusan pemberdayaan perempuan, dan sekretariat tahun 2019 yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 25 orang terhadap jumlah total jabatan yang ada sebanyak 25 jabatan.

B. Keberadaan jabatan fungsional.

Terdapat 3 Jabatan fungsional pada bagian urusan pemberdayaan perempuan dan sekretariat yaitu Pejabat Fungsional Perencana Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Komputer Terampil.

4. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kebijakan Program yang dilaksanakan untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2019 untuk Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM / KEGIATAN
1	2
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7	Penyediaan alat tulis kantor
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12	Penyediaan makanan dan minuman
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

NO	PROGRAM / KEGIATAN
1	2
1	Pembangunan gedung kantor
2	Pengadaan mobil jabatan
3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
4	Pengadaan Meubelair
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6	Pemeliharaan rutin/berkala pagar,halaman dan tempat parkir
7	Penataan Taman dan Kebersihan serta kebun hortikultura
III	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
1	Pengadaan pakaian olahraga
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
IV	**Program Peningkatan Kapasitas S umber Daya Aparatur**
1	Pendidikan dan pelatihan formal
2	Rapat koordinasi perencanaan
V	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja S KPD
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3	Penyusunan rka-SKPD
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5	Penyusunan renja SKPD
6	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah
VI	**Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah**
1	Pengelolaan inventaris barang daerah
VII	**Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**
1	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak
2	Sosialisasi Advokasi PUG di Kab/Kota
3	Rakor Pokja PUG Kab/Kota se-Kalteng
4	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatap PkdRT Prov/Kab/Kota se- Kalteng
5	Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA Tingkat Provinsi
7	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi
8	Rakornas Forum Anak Nasional
9	S osialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak
10	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan S ayang Ibu
11	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan SayangIbu (GSI) Provinsi,Kabupaten dan Kota
12	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota
13	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang PHA
14	Monev PUG di Daerah
15	Monev Perlindungan Perempuan dan Anak Didaerah
16	Penyuluan tentang perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak
VIII	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**
1	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)
2	Pemantapan Jejaring Kelembagaan
IX	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**
1	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng
2	Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan
3	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

NO	PROGRAM / KEGIATAN
1	2
4	Pelatihan/Magang Tenaga Pendamping P2TP2A se Kab/Kota
5	Penyediaan Jasa Operasional Satgas PkdRT (Penyuluhan, dll)
6	Sosialisasi advokasi layanan P2TP2A
7	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
8	Pembinaan terhadap posyandu melalui penguatan gerakan sayang ibu (GSI)
X	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**
1	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan
2	Promosi Peningkatan Peran S erta Perempuan Dalam Pembangunan
3	Capacity Building Bagi Perempuan
4	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan
XI	**Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak**
1	Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan Hukum
2	Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
3	Seminar dan Penyuluhan tentang Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga
4	Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA
5	Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak
XII	**Program Penyusunan Profil Lembaga**
1	Pengembangan S istem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak
2	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak
3	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik
4	Pengembangan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RKA Perangkat Daerah).

   Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyusun RENSTRA 2016-2021, RENJA 2019 dan RKA 2019 serta RKPD 2019 sebagai pedoman pelaksanaannya.

2) Dalam pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berdasarkan program-program yang telah tersusun dan terakomodir dalam RKPD secara keseluruhan, sehingga dalam pelaksanaannya berpedoman pada RKPD tersebut.

3) Dalam pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 telah tersusun program RENJA yang mengakomodir semua program yang telah direncanakan sebelumnya yang dituangkan dalam RKA tahun 2019.

4) Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan RKA tahun 2019 telah mengakomodir semua program yang telah ditentukan, diterbitkan DPA tahun 2019 sebagai sarana melaksanakan program.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana
   a. Sarana dan prasarana yang digunakan pada bagian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sekretariat tahun 2019 sudah emncukupi dalam menunjang kinerja.
   b. Keberadaan barang milik daerah inventarisasi kantor dilakukan pencatatan dalam buku inventaris barang dan kartu inventaris barang dan dilakukan pengkodean menurut jenis barang.
   c. Pada Tahun Anggaran 2019 untuk Anggaran pembangunan gedung kantor telah tersedia sehingga pada tahun 2019 sudah dilakukan proses pembangunan gedung Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang seyogyanya berada pada Jl. Brigjen Katamso pasca kebakaran tanggal 14 April 2014. Tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk bagian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekretariat dan UPT PPA untuk sementara menggunakan gedung aula ex Perindustrian dan Perdagangan di jl. M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya.

7. Permasalahan dan Solusi

   Permasalahan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tengah :

   1) Belum maksimalnya pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
   2) Belum maksimalnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah.
   3) Belum maksimalnya pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah.
   4) Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak.
   5) Belum efektifnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan mayarakat.

8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Peluang Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut :

1) Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2) Menguatnya isu ketimpangan gender
3) Dukungan kuat dari masyarakat terhadap program PUG dan PUHA
4) Meningkatnya jumlah penduduk perempuan yang mendorong banyaknya SDM Perempuan yang potensial.
5) Tersedianya Organisasi-organisasi yang peduli akan pemberdayaan perempuan.
6) Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang memiliki perhatian terhadap masalah perlindungan perempuan dan anak serta remaja.
7) Adanya peraturan perundang-undangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8) Dukungan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9) Kemajuan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam akses terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan informasi kasus terkait kekerasan.
10) Banyaknya UKM perempuan di Provinisi Kalimantan Tengah yang mendorong pemberdayaan perempuan dalam aspek ekonomi dan sosial.

Sedangkan kekuatan Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut :

1) Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
2) Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah (SOP, SPM, Perda, Pergub dll).
3) SDM dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.
4) Tersedianya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan
5) Terbentuknya jejaring kelembagaan.
6) Koordinasi yang baik dengan Kabupaten/kota dan SKPD terkait.

b. Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah juga pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud untuk dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan fungsi :

1) perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
5) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
6) pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

2. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perangkat Daerah merupakan perbandingan capaian kinerja pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah tertuang dalam Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana

didalamnya diterangkan jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk menganalisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pencapaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah

NO	Indikator	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian
			2017	2018	2019	2020	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**						
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,50	1,10	1,20	1,30	1,40	2,29
12.2	Rasio akseptor KB	83,29	79,70	80,60	81,49	82,39	77,44
12.3	Cakupan peserta KB aktif (Orang)	425.000	382.023	394.756	403.585	412.413	354.667
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	148.072	170.497	164.891	159.285	153.678	239.863

3. Kepegawaian
   a. Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering.

      Jumlah Struktur Jabatan yang ada pada bagian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan prosedur dan persyaratan pelantikan jabatan yang didudukinya. Adapun rincian SDM Pegawai pada bagian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

      (1) Jumlah PNS sebanyak 8 orang status aktif bekerja.
      (2) Berdasarkan pangkat dan golongan
         - Golongan IV = 3 orang
         - Golongan III = 4 orang
         - Golongan II = 1 orang

- Golongan I = - orang
- CPNS = - orang

(3) Pegawai Kontrak = 1 orang

(4) Berdasarkan eselon

- Eselon II = - orang
- Eselon III = 1 orang
- Eselon IV = 2 orang

(5) Jumlah Pejabat Struktural 4 orang

(6) Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan pada pada bagian Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tahun 2019 sebanyak 4 orang terhadap jumlah total pejabat yang ada yaitu sebanyak 4 orang.

(7) Jumlah pejabat pada pada bagian Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tahun 2019 yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 4 orang terhadap jumlah total jabatan yang ada sebanyak 4 jabatan.

4. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kebijakan Program yang dilaksanakan untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2019 untuk Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
I	Program Keluarga Berencana
1	Pelayanan KIE
2	Promosi Kepedulian KB
3	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota seKalimantan Tengah
4	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk
5	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah
6	S inkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk
7	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga S ejahtera

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
8	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran S erta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB
9	Pembinaan ketahanan keluarga pada kegiatan momentum keluarga berencana
II	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
1	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
III	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
1	Peningkatan Kualitas S DM

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
   1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RKA Perangkat Daerah).

      Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah disusun RENSTRA 2016-2021, RENJA 2019 dan RKA 2019 serta RKPD 2019 sebagai pedoman pelaksanaannya.
   2) Dalam pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah berdasarkan program-program yang telah tersusun dan terakomodir dalam RKPD secara keseluruhan, sehingga dalam pelaksanaannya berpedoman pada RKPD tersebut.
   3) Dalam pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 telah tersusun program RENJA yang mengakomodir semua program yang telah direncanakan sebelumnya yang dituangkan dalam RKA tahun 2019.
   4) Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan RKA tahun 2019 telah mengakomodir semua program yang telah ditentukan, diterbitkan DPA tahun 2019 sebagai sarana melaksanakan program.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana
   a. Sarana dan prasarana yang digunakan pada bagian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 belum mencukupi yaitu sarana untuk pelayanan operasional ke kabupaten.
   b. Keberadaan barang milik daerah inventarisasi Kantor dilakukan pencatatan dalam buku inventaris barang dan kartu inventaris barang dan dilakukan pengkodean menurut jenis barang.

c. Pada Tahun Anggaran 2019 untuk Anggaran pembangunan gedung kantor telah tersedia sehingga pada tahun 2019 sudah dilakukan proses pembangunan gedung Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang seyogyanya berada pada Jl. Brigjen Katamso pasca kebakaran tanggal 14 April 2014. Tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk bagian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekretariat dan UPT PPA untuk sementara menggunakan gedung aula ex Perindustrian dan Perdagangan di jl. M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya.

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Perangkat Daerah DP3A-PPKB Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah :

1) Belum maksimalnya pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah.
2) Belum maksimalnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah.
3) Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak.
4) Belum efektifnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan mayarakat

8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Peluang Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu sebagai berikut :

1) Dukungan Pemerintah Daerah dalam bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
2) Adanya peraturan perundang-undangan di Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
3) Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung keluarga berencana.
4) Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007.
5) Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.

6) Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanaan keluarga.
7) Belum jelasnya kewenangan pusat dan provinsi terkait Urusan PPKB sehingga pelayanan ke daerah masih dilaksanakan oleh pusat.
8) Kemudahan informasi tentang KB.
9) Animo masyarakat untuk ber KB cukup tinggi.

Sedangkan kekuatan Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu sebagai berikut :

1) Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
2) Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah (SOP, SPM, Perda, Pergub dll).
3) SDM dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.
4) Tersedianya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
5) Terbentuknya jejaring kelembagaan.
6) Koordinasi yang baik dengan Kabupaten/kota dan SKPD terkait.
7) Perlu adanya pengembangan SDM dengan pendidikan dan pelatihan sehubungan dengan PPKB.

D. Indikator Kinerja Kunci

1. Tataran Pengambil Kebijakan

(Nihil)

2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum

Berikut Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

a. Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 sebanyak 1 program dari total Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program sehingga capaian kinerja yaitu 100%.
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) terdiri dari :

- Pelayanan Penanganan Pengaduan Secara Langsung di P2TP2A
- Pelayanan Penanganan Pengaduan Secara Langsung Dengan Intervensi Krisis di P2TP2A
- Pelayanan Penanganan Pengaduan Secara Tidak Langsung di P2TP2A
- Pelayanan Penanganan Pengaduan Secara Dengan Jangkauan di P2TP2A

KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jumlah PERDA pelaksanaan untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 sebanyak 2 PERDA terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM sebanyak 2 PERDA sehingga capaian kinerja 100%.

PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

a. Jabatan struktural yang terisi pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 25 jabatan terhadap Jabatan yang ada/tersedia sebanyak 25 jabatan
b. Jabatan fungsional dalam struktur organisasi pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 yaitu Jabatan Fungsional : Perencana Pertama, Paranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Komputer Terampil.

PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

a. Jumlah PNS pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 sebanyak 48 personil terhadap Total PNS Provinsi sebanyak 10.059 personil.
b. Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 sebanyak 21 orang terhadap jumlah total pejabat yang ada yaitu sebanyak 25 orang.
c. Jumlah pejabat pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 25 orang terhadap jumlah total jabatan Perangkat Daerah yang ada sebanyak 25 jabatan.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Dokumen Perencanaan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:
   - RENSTRA Perangkat Daerah

- RENJA Perangkat Daerah
- RKA-SKPD Perangkat Daerah

b. Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 sebanyak 12 program terhadap jumlah program dalam RENJA pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 12 program sehingga capaian kinerja 100%.

c. Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 sebanyak 12 program terhadap jumlah program dalam RKA pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 sebanyak 12 program sehingga capaian kinerja 100%.

d. Jumlah Program RENJA pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 yang diakomodir dalam DPA pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 sebanyak 12 program terhadap jumlah program dalam DPA pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 sebanyak 12 program sehingga capaian kinerja 100%.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a. Pada tahun 2019 Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat alokasi dana sebesar Rp. 17.461.137.486,- dari total APBD Rp.5.619.996228.075,42,- dengan presentase 0,31%.

b. Belanja modal tahun 2019 sebesar Rp. 2.792.000.557,00 dari total belanja perangkat daerah Rp. 15.443.709.990,-.

c. Total belanja pemeliharaan tahun 2019 Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp. 214.548.800,- dari total belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.066.604.725,-.

d. Total belanja pemeliharaan tahun 2019 Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 214.548.800,- dari total belanja perangkat daerah Rp. 15.443.709.990,-.

e. Laporan keuangan yang dibuat pengelola keuangan Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada Urusan Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2019 terdiri dari Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

a. Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 berupa dokumen KIR, KIB dan Buku Inventaris
b. Jumlah asset yang tidak digunakan sebanyak Rp. 0,- dari jumlah asset yang dikuasai Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 yaitu sebanyak Rp. 5.687.187.699,-

PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

a. Bentuk-bentuk fasilitas prasarana informasi yang diberikan Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 kepada masyarakat yaitu berupa papan pengumuman, pos pengaduan, *leaflet*, pengumuman di media masa dan mobil keliling.
b. Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 belum pernah mengadakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

a. Tidak terdapat Program Nasional yg dilaksanakan untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019.
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) terdiri dari :
   - Pembinaan Ketahanan Keluarga
   - Pembinaan KIE Keluarga Berencana
   - Program Pengendalian Penduduk

KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jumlah PERDA pelaksanaan untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 sebanyak 2 PERDA terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM sebanyak 2 PERDA sehingga capaian kinerja 100%.

PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

a. Jabatan struktural yang terisi pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 4 jabatan terhadap Jabatan yang ada/tersedia sebanyak 4 jabatan.
b. Tidak Terdapat Jabatan fungsional dalam struktur organisasi pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019.

PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

a. Jumlah PNS pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 sebanyak 8 personil terhadap Total PNS Provinsi sebanyak 10.059 personil.
b. Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 sebanyak 4 orang terhadap jumlah total pejabat yang ada yaitu sebanyak 4 orang.
c. Jumlah pejabat pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 4 orang terhadap jumlah total jabatan Perangkat Daerah yang ada sebanyak 4 jabatan.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Dokumen Perencanaan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:
   - RENSTRA Perangkat Daerah
   - RENJA Perangkat Daerah
   - RKA-SKPD Perangkat Daerah
b. Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 sebanyak 3 program terhadap jumlah program dalam RENJA pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 3 program sehingga capaian kinerja 100%.
c. Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 sebanyak 3 program terhadap jumlah program dalam RKA pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 sebanyak 3 program sehingga capaian kinerja 100%.

d. Jumlah Program RENJA pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 yang diakomodir dalam DPA pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 sebanyak 3 program terhadap jumlah program dalam DPA pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 sebanyak 3 program sehingga capaian kinerja 100%.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a. Pada tahun 2019 Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapat alokasi dana sebesar Rp. 612.182.000,- dari total APBD Rp. 5.619.996228.075,42,- dengan presentase 0,01%.
b. Belanja modal tahun 2019 sebesar Rp. 0,- dari total belanja perangkat daerah Rp. 602.137.029,-.
c. Total belanja pemeliharaan tahun 2019 Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 0,- dari total belanja barang dan jasa sebesar Rp. 561.237.029,-.
d. Total belanja pemeliharaan tahun 2019 Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 0,- dari total belanja perangkat daerah Rp. 602.137.029,-.
e. Laporan keuangan yang dibuat pengelola keuangan Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tahun 2019 terdiri dari Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

a. Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 berupa dokumen KIR, KIB dan Buku Inventaris
b. Jumlah asset yang tidak digunakan sebanyak Rp. 0,- dari jumlah asset yang dikuasai Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 yaitu sebanyak Rp. 73.047.871,-

PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

a. Belum terdapat fasilitas prasarana informasi yang diberikan Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019.
b. Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 belum mengadakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

a. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
(Nihil)

b. Urusan Pemerintahan Umum
(Nihil)

3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan

Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu dengan rincian sebagai berikut **:**

1. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota = 989,25%
Jumlah seluruh kabupaten dan kota = 14 kab/kota

Tabel 3.5
Partisipasi Angkatan Kerja

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Tahun 2019	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja (Sudah Memiliki Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning)	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
1	Kotawaringin Barat	76.288	52.265	68,51
2	Kotawaringin Timur	104.708	72.825	69,55
3	Kapuas	83.592	52.061	62,28
4	Barito Selatan	28.487	21.072	73,97
5	Barito Utara	31.801	23.590	74,18
6	Katingan	37.768	26.808	70,98
7	Seruyan	48.648	33.806	69,49
8	Sukamara	15.219	10.339	67,93
9	Lamandau	18.539	13.886	74,90
10	Gunung Mas	28.730	22.723	79,09
11	Pulang Pisau	30.901	23.410	75,76
12	Murung Raya	26.024	16.392	62,99
13	Barito Timur	33.675	23.431	69,58
14	Kota Palangka Raya & Provinsi	62.343	43.658	70,03
	Jumlah	626.723	436.266	989,25

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten/ Kota}} = \frac{989{,}25\%}{14} \text{ X } 100\ \% = \mathbf{70{,}66\ \%}$$

2. Prevalensi peserta KB aktif

Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota = 1.128,04%

Jumlah seluruh kabupaten dan kota = 14 kab/kota

Tabel 3.6
Prevalensi peserta KB aktif

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUS	Jumlah Peserta KB aktif	Prevalensi Peserta KB Aktif (%)
1	2	3	4	5
1	Kotawaringin Barat	50.273	31976	63,60%
2	Kotawaringin Timur	92.158	66400	72,05%
3	Kapuas	51.942	67053	129,09%
4	Barito Selatan	20.206	12968	64,18%
5	Barito Utara	25.506	18971	74,38%
6	Katingan	32.564	28784	88,39%
7	Seruyan	22.115	14438	65,29%
8	Sukamara	11.074	9615	86,82%
9	Lamandau	15.682	11949	76,20%
10	Gunung Mas	24.345	17595	72,27%
11	Pulang Pisau	18.591	16604	89,31%
12	Murung Raya	21.673	17752	81,91%
13	Barito Timur	23.002	18981	82,52%
14	Kota Palangkaraya	48.830	40054	82,03%
JUMLAH		457.961	373.140	1128,04%

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}} = \frac{1{,}128{,}04\%}{14} = \mathbf{80{,}57\ \%}$$

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

1. Dasar Hukum

Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan Program dan kegiatan didukung anggaran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI berupa Dana Dekonsentrasi.

Adapun dasar hukum pemberian dukungan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggran Pendapaatn dan Belanja Negera;
10) Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas pembantuan;
11) Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara;

12) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penatausahaan Dekonsentrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. **Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh dana APBN dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa Dana Dekonsentrasi APBN Tahun Anggaran 2019.

3. **Program dan Kegiatan**

Program/Kegiatan yang diterima dan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 melalui Dana Dekonsentrasi APBN yaitu Program Penguatan Kelembagaan KtP/KtA dan PUG di Prov/Kab/Kota serta Penjangkauan Korban oleh Satgas PMPA di tingkat Provinsi yang terdiri atas tujuh nomenklatur komponen :

1. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelembagaan PUG
2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam pelembagaan PUG
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pelembagaan PUHA
4. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam pelembagaan PUHA
5. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dalam Percepatan KGPP
6. Layanan Umum Pelaksanaan Teknis Dekonsentrasi
7. Koordinasi teknis pelaksanaan dekonsentrasi PPA

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT		PAGU (Rp)	REALISASI PER 31 DESEMBER 2019			PERMASALAHAN
					KEUANGAN		FISIK	
		VOLUME	SATUAN		Rp	%	%	
1	2	3	4	5	12	13	14	15
1	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelembagaan PUG	1	Provinsi	540.229.000,00	507.763.700,00	93,99	100,00	Proses Penjadwalan Pelaksanaan Sub Komponen Pelatihan OPD Penggerak PPRG (Bappeda, Inspektorat, Ortala, keuangan, Dinas PPPA) Provinsi
2	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam pelembagaan PUG	14	Kab/Kota	257.271.000,00	235.345.200,00	91,48	100,00	Sub Komponen Kegiatan telah selesai dilaksanakan
3	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pelembagaan PUHA	1	Provinsi	143.779.000,00	130.329.000,00	90,65	100,00	- Pelaksanaan Sub Komponen Bimtek Gugus Tugas KLA dengan Analisis PUHA Provinsi pada tanggal 5 s/d 6 Desember 2019 di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya

No.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT		PAGU (Rp)	REALISASI PER 31 DESEMBER 2019			PERMASALAHAN
					KEUANGAN		FISIK	
		VOLUME	SATUAN		Rp	%	%	
1	2	3	4	5	12	13	14	15
								dengan peserta berasal dari 14 Kab/Kota se Kalteng berjumlah 43 orang dari dari 49 orang yang direncanakan. - Penyelesaian dokumen pertanggungjawaban keuangan terhadap pelaksanaan sub komponen.
4	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam pelembagaan PUHA	14	Kab/Kota	160.121.000,00	153.128.800,00	95,63	100,00	- Telah selesai dilaksanakan Sub Komponen Kegiatan dengan target sasaran 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah
5	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dalam Percepatan KGPP	14	Kab/Kota	339.000.000,00	322.862.300,00	95,24	100,00	Telah selesai dilaksanakan 1 (satu) Sub

No.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT		PAGU (Rp)	REALISASI PER 31 DESEMBER 2019			PERMASALAHAN
					KEUANGAN		FISIK	
		VOLUME	SATUAN		Rp	%	%	
1	2	3	4	5	12	13	14	15
								Komponen Kegiatan Tambahan dengan target 14 Kab/Kota se Kalimantan Tengah
6	Layanan Umum Pelaksanaan Teknis Dekonsentrasi	1	Layanan	169.964.000,00	117.327.816,00	69,03	100,00	- Melakukan proses administrasi kantor - Verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan - Monitoring pelaksanaan sub komponen kegiatan - Mengajukan dokumen SPM guna penerbitan SP2D ke KPPN Wilayah Palangka Raya - Melakukan penutupan kas di Bendahara Pengeluaran

No.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT		PAGU (Rp)	REALISASI PER 31 DESEMBER 2019			PERMASALAHAN
					KEUANGAN		FISIK	
		VOLUME	SATUAN		Rp	%	%	
1	2	3	4	5	12	13	14	15
7	Koordinasi teknis pelaksanaan dekonsentrasi PPA	1	Kegiatan	89.636.000,00	88.598.800,00	98,84	100,00	- Telah Selesai Pelaksanaan Sub Komponen Kegiatan
TOTAL				**1.700.000.000,00**	**1.555.355.616,00**	**91,49**	**100,00**	

5. **Sumber dan jumlah Anggaran yang digunakan**

No	Program	Sumber Anggaran Dekonsentrasi APBN	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Program Penguatan Kelembagaan KtP/KtA dan PUG di Prov/Kab/Kota serta Penjangkauan Korban oleh Satgas PMPA di tingkat Provinsi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	**1.700.000.000,-**
	JUMLAH		**1.700.000.000,-**

6. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Dana Tugas Pembantuan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

7. **Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.902/039/Sekre/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi (APBN) di Lingkungan Satker Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019. Jumlah pejabat yang ditunjuk adalah 7 orang beserta Kepala Dinas sebagai KPA dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA/Sederajat, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Nama : Dr. ADM. Tangkudung, M.Kes NIP : 19630527 199102 1 001 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nama : Alfon Zaini Hafidz, ST NIP : 19801103200501 1 010 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Nama : Ariyani NIP : 19800904 200012 2 002 Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran
4.	Nama : Siti Subaidah NIP : 19641231 199103 2 052 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penguji dan Penandatanganan SPM
5.	Nama : Marfengki Wanto, SE NIP : 19870201 201502 1 001 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

No	Nama/NIP	Jabatan
6.	Nama : Hero Walpatera, S.Kom NIP : 19860409 201101 1 002 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan
7.	Nama : Rosalia, A.Md NIP : 19871006 201001 2 001 Pangkat/Golongan : Pengatur Tngkat I (II/d)	Staf Pengelola Keuangan
8.	Nama : Sheptori, A.Md NIP : - Pangkat/Golongan : -	Pengelola SAI/ Pengelola BMN

8. Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi sarana yang digunakan belum mencukupi atau masih menggunakan sarana alokasi dana APBD dikarenakan belum adanya pembagian anggaran dari alokasi dana dekonsentrasi APBN untuk pengadaan sarana kegiatan.

9. Pemasalahan dan Solusi

Secara umum tidak terdapat permasalahan selama pelaksanaaan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana konsentrasi APBN.

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

(Belum ada pelaksanaan program yang terkait)

BAB VI

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 tahun anggaran yang akan dikumpulkan secara kolektif oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutkan akan disampaikan oleh sekretariat daerah kepada kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019 dengan mengacu pada kewenangan Perangkat Daerah DP3A-PPKB, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan, tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah DP3A-PPKB Tahun Anggaran 2019, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2019, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2016 - 2021 dapat dicapai dan dilaksanakan.

Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2019 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah DP3A-PPKB Tahun Anggaran 2019 ini dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Provinsi Kalimantan Tengah guna mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Kepala Dinas P3A-PPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

BAB VI

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 tahun anggaran yang akan dikumpulkan secara kolektif oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutkan akan disampaikan oleh sekretariat daerah kepada kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019 dengan mengacu pada kewenangan Perangkat Daerah DP3A-PPKB, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan, tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah DP3A-PPKB Tahun Anggaran 2019, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2019, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2016 - 2021 dapat dicapai dan dilaksanakan.

Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2019 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah DP3A-PPKB Tahun Anggaran 2019 ini dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Provinsi Kalimantan Tengah guna mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Kepala Dinas P3A-PPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS P3A-PPKB

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

LAMPIRAN: I.1. FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)

No	ASPEK	FOKUS	No. IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (Tahun 2018)	SATUAN ELEMEN DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	CATATAN/SUMBER DATA LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Hubungan antar daerah	7	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU pemprov dengan daerah lain (yang masih berlaku tahun 2019)	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2018	Jumlah	0	0	Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan
						1. MOU dengan ------ tentang kerjasama ------.	.....MoU			Catatan : Jika MOU lebih dari 8, jumlah sisanya dilsikan pada sel (L25) dgn melampirkan daftar sisa MOU tsb. Contoh jika jml MOU sebenarnya 15, maka dl sell (L25) dlisi 7
						2. MOU dengan ------ tentang kerjasama ------.	.....MoU			
						3. MOU dengan ------ tentang kerjasama ------.	.....MoU			
						4. MOU dengan ------ tentang kerjasama ------.	.....MoU			
						5. MOU dengan ------ tentang kerjasama ------.	.....MoU			
						6. MOU dengan ------ tentang kerjasama ------.	.....MoU			
						7. MOU dengan ------ tentang kerjasama ------.	.....MoU			
						8. MOU dengan ------ tentang kerjasama ------.	.....MoU			
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	37	Penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019.	Jumlah penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	Penghargaan	2	2	Sumber data dari Bagian Humas dan Perangkat Daerah yang menerima penghargaan Catatan : Jika PERDA lebih dari 3, jumlah sisanya dlisikan pada sel (L118)
						1. Penghargaan		Keterbukaan Informasi		
						2. Penghargaan		Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2019		
						3. Penghargaan				
						4. Penghargaan				
						5. Penghargaan ...				0

LAMPIRAN: I.2. FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)

URUSAN YG DILAKSANAKAN : 1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (Tahun 2018)	SATUAN ELEMEN DATA	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		CATATAN/SUMBER DATA LAIN
								ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	program	Program kesesasan kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan peran serta dan kesetarasb gender dalam pembangunan, Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Program Penyusunan Profil Lembaga	Program kesesasan kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan peran serta dan kesetarasn gender dalam pembangunan, Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Program	Program Keluarga Berencana, Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Program Keluarga Berencana, Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Jumlah SOP	...buah	4	ada sebanyak 4 SOP	3	ada sebanyak 3 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis (Jika terdapat lebih dari 5, jumlah sisanya diisi pada sheet K16 dan M16)
						SOP #1	Nama SOP	Pelayanan Penanganan Pengaduan Secara Langsung di P2TP2A		Pembinaan Ketahanan Keluarga		
						SOP #2	Nama SOP	Pelayanan Penanganan Pengaduan Secara Langsung Dengan Intervensi Krisis di P2TP2A		Pembinaan KIE Keluarga Berencana		
						SOP #3	Nama SOP	Pelayanan Penanganan Pengaduan Secara Tidak Langsung di P2TP2A		Program Pengendalian Penduduk		
						SOP #4	Nama SOP	Pelayanan Penanganan Pengaduan Secara Dengan Jangkauan di P2TP2A				
						SOP #5	Nama SOP					
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Perda		tdl		tdl	Sumber data di Biro Hukum
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda					
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	25	100.00	4	100.00	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah'
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	25		4		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan	Jabatan	3	ada	0	tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019 (Jika terdapat lebih dari 5, jumlah sisanya diisi pada sheet K25 dan M25)
						1. Macam Jabatan Fungsional #1	Nama Macam Jabatan Fungsional	Perencana Pertama				
						2. Macam Jabatan Fungsional #2		Pranata Komputer Ahli Pertama				
						3. Macam Jabatan Fungsional #3		Pranata Komputer Terampil				
						4. Macam Jabatan Fungsional #4						
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS PD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS PD	Personil	48	0.48	8	0.08	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019 Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
						Jumlah PNS Provinsi	Personil	10.059		10.059		
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan	orang	21	84.00	4	100.00	
						Jumlah pejabat PD yang ada	orang	25		4		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Jumlah pejabat PD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	25	salah tolong cek	4	100.00	
						Jumlah pejabat PD yang ada	orang	4		4		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada, Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak	dokumen	3	3	3	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
				-RENSTRA-PD		-RENSTRA-PD	ada/tidak	ada		ada		
				-RENJA-PD		-RENJA-PD	ada/tidak	ada		ada		
				-RKA-PD		-RKA-PD	ada/tidak	ada		ada		
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah	program	12	100.00	3	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
						Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD	program	12		3		

No.	ASPEK	FOKUS	NO. IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (Tahun 2018)	SATUAN ELEMEN DATA	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		CATATAN/SUMBER DATA LAIN
								ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	program	12	100,00	3	100,00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
						Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah	program	12		3		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	program	12	100,00	3	100,00	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
						Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah	program	12		3		
6	Laporan keuangan PD	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah	Rp		tdl		tdl	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)
						Total Anggaran Belanja APBD	Rp	5.619.996.228.075,42		5.619.996.228.075,42		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah	Rp	2.792.000.557,00	18,08	-	0,00	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
						Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	15.443.709.990,00		602.137.029,00		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari tota belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Balanja Langsung Perangkat Daerah	Rp	9.448.808.259,00	61,18	602.137.029,00	100,00	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
						Total Realisasi Belanja perangkat Daerah	Rp	15.443.709.990,00		602.137.029,00		
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah	Rp	9.448.808.259,00	61,18		tdl	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
						Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	15.443.709.990,00		602.137.029,00		
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
						- Neraca	ada/tidak	ada		ada		
						- LRA	ada/tidak	ada		ada		
						- CALK	ada/tidak	ada		ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang / asset PD	ada atau tidak ada inventerisasi barang / asset PD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsilasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
		Penggunaan Aset Perangkat Daerah	19	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh PD	Jumlah aset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total aset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Jumlah aset yang tidak digunakan PD	Rp	-	0,00	-	0,00	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsilasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
						Total Aset yang dikuasai PD	Rp	5.867.187.699,00		73.047.871,00		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	5	0	0	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
						1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		tidak		
						2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		tidak		
						3. Leaflet	ada/tidak	ada		tidak		
						4. Mobil keliling	ada/tidak	ada		tidak		
						5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada		tidak		
		Responsivitas terhadap Partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang 1. Survey tentang ..., ...	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN: I.3. FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERANGKAT DAERAH: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)

No.	URUSAN	No. IKK	IKK	RUMUS	SATUAN ELEMEN DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				URUSAN WAJIB				
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	72	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	Rp	34.108.433.835	0,01	Sumber data dari DP3PPKB
				Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi	Rp	2.722.202.646.375		
		73	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	%	34108433891	2436316706,50	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
				Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	Kab/kota	14		
		74	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	%	156,55	11,18	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
				Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	Kab/kota	14		
		75	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota	%		tdi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
				Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	Kab/kota	14		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	91	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota		236,29	16,88	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota dan DP3PPKB
				Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	Kab/kota	14		
		92	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota			tdi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota dan DP3PPKB
				Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	Kab/kota	14		
		93	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	orang	373.140,00	81,48	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota dan DP3PPKB
				Jumlas Pasangan Usia Subur	orang	457961		
		94	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	orang	57.452,00	12,55	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota dan DPMDes Prov
				Jumlas Pasangan Usia Subur	orang	457961		

Data Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak per akhir Desember 2019

No	KABUPATEN/KOTA	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi	Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	Capaian Kinerja 2019 (angka rasio)
1	KOTAWARINGIN BARAT	0	82.269	0,00
2	KOTAWARINGIN TIMUR	3	134.516	0,22
3	KAPUAS	15	135.108	1,11
4	BARITO SELATAN	2	41.964	0,48
5	BARITO UTARA	2	50.758	0,39
6	KATINGAN	0	50.978	0,00
7	SERUYAN	0	48.027	0,00
8	SUKAMARA	0	20.053	0,00
9	LAMANDAU	2	29.337	0,68
10	GUNUNG MAS	2	44.091	0,45
11	PULANG PISAU	0	43.109	0,00
12	MURUNG RAYA	0	35.603	0,00
13	BARITO TIMUR	0	37.013	0,00
14	KOTA PALANGKA RAYA	5	86.690	0,58
JUMLAH		31	839.516	3,92

Capaian Kinerja Provinsi	0,28

Palangka Raya, Januari 2020
Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS P3A-PPKB

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

Data Partisipasi angkatan kerja perempuan per akhir Desember 2019

No	KABUPATEN/KOTA	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan (koordinasi dengan Disnakertrans)	Jumlah angkatan kerja perempuan (koordinasi dengan Disnakertrans)	Capaian Kinerja 2019(%)
1	KOTAWARINGIN BARAT	52.265	76.288	68,51
2	KOTAWARINGIN TIMUR	72.825	104.708	69,55
3	KAPUAS	52.061	83.592	62,28
4	BARITO SELATAN	21.072	28.487	73,97
5	BARITO UTARA	23.590	31.801	74,18
6	KATINGAN	26.808	37.768	70,98
7	SERUYAN	33.806	48.648	69,49
8	SUKAMARA	10.339	15.219	67,93
9	LAMANDAU	13.886	18.539	74,90
10	GUNUNG MAS	22.723	28.730	79,09
11	PULANG PISAU	23.410	30.901	75,76
12	MURUNG RAYA	16.392	26.024	62,99
13	BARITO TIMUR	23.431	33.675	69,58
14	KOTA PALANGKA RAYA	43.658	62.343	70,03
JUMLAH		436.266	626.723	989,25

Capaian Kinerja Provinsi	70,66

Palangka Raya, Januari 2020
Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS P3A-PPKB

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

Data Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) per akhir Desember 2019

No	KABUPATEN/KOTA	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Jumlah penduduk perempuan	Capaian Kinerja 2019 (angka rasio)
1	KOTAWARINGIN BARAT	3	122.257	2,45
2	KOTAWARINGIN TIMUR	22	199.434	11,03
3	KAPUAS	21	200.949	10,45
4	BARITO SELATAN	6	62.811	9,55
5	BARITO UTARA	19	74.965	25,35
6	KATINGAN	7	75.340	9,29
7	SERUYAN	0	69.961	0,00
8	SUKAMARA	5	29.535	16,93
9	LAMANDAU	7	42.430	16,50
10	GUNUNG MAS	12	64.165	18,70
11	PULANG PISAU	4	63.513	6,30
12	MURUNG RAYA	0	52.469	0,00
13	BARITO TIMUR	6	55.210	10,87
14	KOTA PALANGKA RAYA	25	130.701	19,13
JUMLAH		137,00	1243740,00	156,55

Capaian Kinerja Provinsi	11,18

Palangka Raya, Januari 2020
Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS P3A-PPKB

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

Data TFR (Angka Kelahiran Total)
per akhir Desember 2019

No	KABUPATEN/KOTA	TFR (Angka Kelahiran Total)
1	KOTAWARINGIN BARAT	2,39
2	KOTAWARINGIN TIMUR	2,18
3	KAPUAS	2,15
4	BARITO SELATAN	1,99
5	BARITO UTARA	2,25
6	KATINGAN	2,25
7	SERUYAN	2,22
8	SUKAMARA	2,4
9	LAMANDAU	2,39
10	GUNUNG MAS	2,78
11	PULANG PISAU	2,92
12	MURUNG RAYA	2,79
13	BARITO TIMUR	2,4
14	KOTA PALANGKA RAYA	1,97
JUMLAH		33,08

Palangka Raya, Januari 2020
Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS P3A-PPKB

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

Data Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun
(Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
per akhir Desember 2019

No	KABUPATEN/KOTA	TFR (Angka Kelahiran Total)
1	KOTAWARINGIN BARAT	45,51
2	KOTAWARINGIN TIMUR	57,01
3	KAPUAS	41,39
4	BARITO SELATAN	47,66
5	BARITO UTARA	49,5
6	KATINGAN	54,75
7	SERUYAN	48,21
8	SUKAMARA	49,76
9	LAMANDAU	39,61
10	GUNUNG MAS	67,34
11	PULANG PISAU	48,21
12	MURUNG RAYA	48,48
13	BARITO TIMUR	33,45
14	KOTA PALANGKA RAYA	18,25
JUMLAH		649,13

Palangka Raya, Januari 2020
Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

DINAS P3A-PPKB

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

Data Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
per akhir Desember 2019

No	KABUPATEN/KOTA	Jumlah peserta KB Aktif Modern	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Capaian Kinerja 2019 (%)
1	KOTAWARINGIN BARAT	31.976	50.273	63,60%
2	KOTAWARINGIN TIMUR	66.400	92.158	72,05%
3	KAPUAS	67.053	51.942	129,09%
4	BARITO SELATAN	12.968	20.206	64,18%
5	BARITO UTARA	18.971	25.506	74,38%
6	KATINGAN	28.784	32.564	88,39%
7	SERUYAN	14.438	22.115	65,29%
8	SUKAMARA	9.615	11.074	86,82%
9	LAMANDAU	11.949	15.682	76,20%
10	GUNUNG MAS	17.595	24.345	72,27%
11	PULANG PISAU	16.604	18.591	89,31%
12	MURUNG RAYA	17.752	21.673	81,91%
13	BARITO TIMUR	18.981	23.002	82,52%
14	KOTA PALANGKA RAYA	40.054	48.830	82,03%
	JUMLAH	373.140	457.961	1128,04%

Capaian Kinerja Provinsi	80,57%

Palangka Raya, Januari 2020
Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

Data Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) per akhir Desember 2019

No	KABUPATEN/KOTA	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Jumlah Pasangan Usia Subur	Capaian Kinerja 2019(%)
1	KOTAWARINGIN BARAT	8.474	50.273	16,86
2	KOTAWARINGIN TIMUR	10.861	92.158	11,79
3	KAPUAS	8.418	51.942	16,21
4	BARITO SELATAN	2.728	20.206	13,50
5	BARITO UTARA	2.840	25.506	11,13
6	KATINGAN	2.748	32.564	8,44
7	SERUYAN	2.876	22.115	13,00
8	SUKAMARA	1.280	11.074	11,56
9	LAMANDAU	1.905	15.682	12,15
10	GUNUNG MAS	3.739	24.345	15,36
11	PULANG PISAU	2.416	18.591	13,00
12	MURUNG RAYA	1.958	21.673	9,03
13	BARITO TIMUR	2.949	23.002	12,82
14	KOTA PALANGKA RAYA	4.260	48.830	8,72
JUMLAH		57.452	457.961	173,57

Capaian Kinerja Provinsi	12,40

Palangka Raya, Januari 2020
Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi

SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 489.P/203/PKP-Diskominfo/VIII/2019

Gubernur Kalimantan Tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada :

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK & KB

Sebagai Badan Publik

PERINGKAT I
MENUJU INFORMATIF

Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Palangka Raya, 17 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

H. SUGIANTO SABRAN

Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2019

Pada tahun 2019 terdapat 2 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Katingan. Penghargaan berupa Tropi diserahkan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Bupati dari Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Katingan pada Malam Penganugrahan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak di Hotel Four Points By Sheraton, Kota Makassar pada tanggal 24 Juli 2019.

1. **KABUPATEN LAMANDAU**

Foto Sertifikat Penghargaan

Foto Menteri KPPPA meyerahkanTropi Penghargaan KLA ke Bupati Lamandau

Foto Tropi Penghargaan KLA

Foto Bupati Lamandau beserta Dinas P3APPKB Kab. Lamandau

2. **KABUPATEN KATINGAN**

Foto Tropi Penghargaan KLA

Foto Menteri KPPPA meyerahkanTropi Penghargaan KLA ke Bupati Katingan